

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ditinjau dari Partisipasi Masyarakat dan Transparansi di Kecamatan

Dimas Arrisky, Rita Martini, Yevi Dwitayanti

Politeknik Negeri Sriwijaya
dimasarrisky28@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this quantitative research is to determine the influence of Community Participation and Transparency on APBdes. Initial data was obtained from a questionnaire. According to this research, the population consists of six villages in Talang Kelapa District. In this research, purposive sampling technique was used to take 130 individuals as samples. uses purposively chosen criteria to determine topics deemed relevant. The SmartPLS 4.0 program is used to complete data analysis tools with measurement model evaluation and structural model evaluation. This research found that the Community Participation variable makes a significant contribution to the management of village income and expenditure budgets. The transparency variable also makes a significant contribution to the management budget.

Keywords: Village Finance, Community Participation, Transparency

ABSTRAK

Tujuan penelitian kuantitatif ini, yaitu guna mengetahui pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi terhadap APBDes. Data awal diperoleh dari kuesioner. Menurut penelitian ini, populasi terdiri dari enam desa di Kecamatan Talang Kelapa. Dalam penelitian ini, teknik *purposive sampling* digunakan untuk mengambil 130 individu sebagai sampel. menggunakan kriteria yang dipilih secara sengaja untuk menentukan topik yang dianggap relevan. Program SmartPLS 4.0 digunakan untuk melengkapi alat analisis data dengan evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural. Studi ini menemukan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat berkontribusi signifikan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Variabel Transparansi juga berkontribusi signifikan terhadap pengelolaan anggaran tersebut.

Kata kunci: Keuangan Desa, Partisipasi Masyarakat, Transparansi

PENDAHULUAN

Di Indonesia, desa menjadi unit paling mungil pada struktur pemerintahan yang punya peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. Desa ialah entitas otonom yang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan dan urusan terkait lainnya. Itu sejalan dengan UU No. 6 Th. 2014 perihal Desa, tentang memberikan desa status sebagai entitas hukum yang punya kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, mengatur kehidupan masyarakat, serta mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dalam sistem otonomi yang luas.

Dalam kerangka otonomi tersebut, desa memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan desa. Persatuan masyarakat ber hukum yang mempunyai wewenang guna mengurus serta mengatur kepentingannya berdasar asal-usulnya ataupun adat istiadatnya disebut sebagai desa. Desa dikatakan bersifat istimewa yang memiliki susunan asli yang berlandaskan hak asal-usul peraturannya di antaranya keanekaragaman, partisipasi, otonomi daerah serta pemberdayaan masyarakat (Alamsyah, 2011). Desa merupakan pelopor kedaulatan penuh sistem demokrasi dan mempunyai normanya masing-masing. Pengelolaan anggaran desa termasuk dalam hak-hak istimewa yang diperolehnya (Iqsan, 2016).

Salah satu alat yang digunakan untuk mengelola keuangan desa adalah APBDes sebagai rencana tahunan untuk desa yang memperlihatkan besaran dana yang diterima dan digunakan selama satu tahun anggaran. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa memperjelas aturan ini. Selain itu, Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa memberikan standar teknis guna pengelolaan keuangan desa, termasuk APBDes. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada desa dalam penyusunan APBDes, penggunaan dana desa, serta mekanisme pertanggungjawabannya. Perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten atau Kota harus dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan desa.

Tak sekadar pemerintah desa saja yang memiliki peran aktif dalam proses perencanaannya, namun juga masyarakatnya demi keberhasilan kebutuhan desa. Proses berjalannya pembangunan desa juga berhak diketahui dan diawasi oleh masyarakatnya, karenanya kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya sangat diperlukan guna kesejahteraan desa. Kesejahteraan masyarakat desa beserta laporan keuangan menjadi tanggung jawab Pemdes. Pelaporan keuangan desa dilakukan sekali dalam setahun ataupun periodik, yang mana dilaporkan kepada Bupati ataupun Walikota (Wibawanti, 2021).

Riset terdahulu telah dilakukan (Amleni et al., 2022) tentang dampak Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas pada tata kelola Dana Desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara; (Oktavia, 2020) tentang dampak Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat pada tata kelola Dana APBDes di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Bondowoso (Puspitasari et al., 2023) tentang dampak Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Efektivitas Pemerintah Desa bagi tata kelola Dana APBDes di mana jenjang pendidikan dijadikan variabel moderasi di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.

Periset mengambil objek di seluruh desa di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin sebagai objek penelitian adalah karena Pemdes ini dalam ihwal transparansi dan akuntabilitas pemerintah sudah menjalankan upaya pemasangan spanduk berkenaan dengan APBDes, perihal itu didukung oleh hasil interviu periset pada seorang perangkat desa yang berada di desa yang terletak di Kecamatan Talang

Kelapa, yang mana pada interviu itu memperoleh hasil bahwasanya keterbukaan kepada tiap pihak yang memerlukan serta mampu mempertanggungjawabkan tiap tindakan yang diambil, terkhusus pengelolaan dana APBDes sudah diterapkan dalam pemerintahan desa di Kecamatan Talang Kelapa, selain itu juga senantiasa mengajak masyarakatnya guna terlibat dalam tiap pelaksanaan program yang didanai, namun tidak semua desa-desa ini yang sudah menerapkan prinsip partisipasi, dan transparansi terhadap pengelolaannya. Akibatnya, studi ini memiliki tujuan untuk menilai partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan APBDes Kecamatan Talang Kelapa.

METODE PENELITIAN

Dengan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif, maka penelitian ini nantinya akan mempergunakan data primer yang terkumpul secara langsung dari responden. Studi ini, periset menggunakan populasi sejumlah enam desa di kecamatan talang kelapa. Dengan menggunakan Metode *purposive sampling* yang dipakai pada saat untuk teknik pengambilan sampelnya ini. Dengan sampelnya sejumlah 130 yang dinilai berkorelasi kepada karakteristik penduduk yang sebelumnya telah periset ketahui. Jumlah unit analisis yang diolah berjumlah sebanyak 130 responden yang terdiri dari masyarakat dan perangkat desa di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.

Unit analisis ini dipilih berdasarkan metode Sampling, di mana sampel tersebut sesuai dengan kriteria. Dengan ketentuan responden terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk ketua RT, kepala dusun, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bagian Permusyawaratan Desa (BPD), serta anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan desa. Setiap orang yang disurvei menerima kuesioner yang bertanya tentang transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan APBDes.

Pengumpulan data dilakukan dari April 2024 hingga Mei 2024 dengan teknik penyebaran kuesioner. Studi ini akan menerapkan analisis Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS) karena teknik ini lebih cocok untuk tujuan prediktif dari penelitian. PLS-SEM pada dasarnya adalah paket lengkap analisis statistik yang mencakup reliabilitas, validitas, dan pengujian hipotesis pada dasar-dasar analisis regresi, moderasi, dan mediasi (Ringle et al., 2022) Untuk lebih memahami mekanisme tujuan penelitian, beberapa mediator digunakan. Studi ini, menerapkan uji statistik PLS. Karena model persamaan struktural berbasis *variance* (PLS) terdapat kemampuan untuk menemukan dan menunjukkan variabel laten yang tidak bisa diukur secara langsung (Yamin, S., dan Kurniawan, 2011). Untuk mengelola data dan melakukan pengujian hipotesis, *software* SmartPLS versi 4 digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dilihat dari gender yang didominasi oleh laki-laki berjumlah 105 (81%) dan perempuan hanya 25 (29%). Dilihat dari jenjang pendidikan, responden memiliki tingkat pendidikan yaitu SD 0%, SMP 0%, tingkat yang paling banyak yaitu SMA 89% dan S1 sebanyak 8%, Diploma sebanyak 2%, S2 sebanyak 1%, dan ditinjau dari masa kerjanya, 1-5 tahun 84 orang (65%) dan 5-10 tahun 37 orang (28%), 10-20 tahun 9 orang.

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1.	Jenis Kelamin		
	a. Laki-laki	105	81%
	b. Perempuan	25	19%
	Total	130	100%
2.	Pendidikan		
	a. SD	-	-
	b. SMP	-	-
	c. SMA	116	89%
	d. S1	11	8%
	a. Diploma	3	2%
	d. S2	1	1%
	Total	130	100%
3.	Masa Kerja		
	a. 0-1 Tahun		
	b. 1-5 Tahun	84	65%
	c. 5-10 Tahun	37	28%
	d. 10-20 Tahun	9	7%
	Total	130	100%

Sumber: data diolah, 2024

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

SmartPLS 4.0 digunakan dalam penelitian ini, untuk mendapatkan estimasi parsial kuadrat terkecil dari model persamaan struktural (SEM-PLS). *Software* ini digunakan untuk mengukur validitas model dan menguji hubungan antar hipotesis dalam model struktural. (Ringle *et al.*, 2022) Pengujian validitas dan reliabilitas diperlukan dengan menggunakan metode pembagian untuk meningkatkan kesesuaian model dan memperoleh perkiraan yang akurat. Terdapat beberapa tes yang digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas konstruk.

Pertama, validitas diuji dengan menggunakan nilai *outer loading* dari setiap indikator dalam variabel, di mana nilai yang disyaratkan adalah >0.7 (Hair Jr *et al.*,

2017). Pada tabel 2, ditemukan bila seluruh indikator berhasil memenuhi nilai validitas *loading* yang disyaratkan. Validitas juga diuji melalui Average Variance Extracted (AVE), dengan nilai minimum yang diperlukan adalah 0.5 (Rigdon *et al.*, 2020). Dari hasil tabel 2 menunjukkan seluruh variabel telah mencapai nilai AVE dengan baik.

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item Indikator	Outer Loading	AVE	Composite reliability	Cronbach's alpha
Partisipasi Masyarakat	PM 1	0.709	0.554	0.897	0.867
	PM 2	0.743			
	PM 3	0.736			
	PM 4	0.770			
	PM 5	0.741			
	PM 6	0.752			
	PM 7	0.757			
Transparansi	T 1	0.738	0.614	0.917	0.897
	T 2	0.746			
	T 3	0.793			
	T 4	0.782			
	T 5	0.785			
	T 6	0.843			
	T 7	0.793			
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes)	PA 1	0.756	0.562	0.899	0.871
	PA 2	0.739			
	PA 3	0.820			
	PA 4	0.725			
	PA 5	0.747			
	PA 6	0.782			
	PA 7	0.718			

Sumber: (Output Smart PLS, 2024)

Kedua, reliabilitas internal konstruksi model diuji menggunakan *Composite Reliability* (CR). Hasil studi memperlihatkan angka *Composite Reliability* untuk tiap variabel lebih tinggi dari nilai yang disarankan, yaitu >0,7 (Hair Jr *et al.*, 2017) Pengujian reliabilitas juga diperkuat oleh hasil pengujian *Cronbach Alpha*, dengan nilai rekomendasi yang sama, yaitu >0.70 (Rigdon *et al.*, 2020). Pada tabel 2, ditemukan nilai *cronbach alpha* untuk seluruh variabel telah melebihi nilai rekomendasi tersebut.

Dalam studi pemodelan SEM-PLS, diperlukan pengujian validitas diskriminan dalam rangka melihat sejauh mana item membedakan antara konstruksi variabel

(Hair Jr *et al.*, 2017). Untuk mengevaluasi validitas diskriminan, rasio akar kuadrat AVE, digunakan terhadap nilai hubungan antara konstruk dalam model. Uji validitas diskriminan menggunakan kriteria Fornell-Larcker menunjukkan bahwa pada tabel 3, korelasi antar konstruk lebih kecil daripada akar kuadrat rata-rata varians yang diekstraksi. Hasil ini menunjukkan bahwa baik validitas maupun reliabilitas penelitian telah tercapai.

Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas Diskriminan

	PM	T	PA
PM	0.744		
T	0.288	0.783	
PA	0.248	0.299	0.749

Sumber: (Output SmartPLS, 2024)

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis memiliki tujuan untuk melihat apakah suatu pernyataan benar secara statistik dan apakah itu diterima atau tidak. (Arifin, 2017). Untuk membuktikan hipotesis, dilakukan analisis statistik menggunakan uji *bootstrapping*, yang menunjukkan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai *path coefficient* digunakan untuk menilai apakah pengaruh variabel positif atau negatif dalam rentang -1 hingga 1. Selanjutnya, nilai T-statistik dan p-value digunakan untuk menentukan signifikansi setiap jalur dalam model. Jalur dianggap signifikan apabila t-statistik di atas 1.64 dan p-value di bawah 0.1.

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

	<i>Path Coefficient</i>	T statistics	P values	Keterangan
PM -> PA	0.235	2.710	0.003	Berpengaruh positif dan signifikan
T -> PA	0.178	2.144	0.016	Berpengaruh positif dan signifikan

Sumber: (Output SmartPLS, 2024)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipengaruhi secara positif signifikan oleh variabel partisipasi masyarakat. Nilai *Path Coefficient* sejumlah 0,235, berarti nilai *Path Coefficient* > 0; t-statistik sejumlah 2.710 sehingga nilai t-statistik di atas 1,640 dan selanjutnya untuk nilai p-values sejumlah 0.003, berarti p-values di bawah 0,100.

Hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh hubungan antara partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan APBDes. Partisipasi adalah tindakan yang

dilakukan oleh pemerintahan desa, yang mencakup semua anggota masyarakat dan institusi desa.

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan ketetapan baik secara langsung memulai lembaga perwakilan yang menyalurkan aspirasinya (Mardiasmo, 2009). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa masyarakat desa di Kecamatan Talang Kelapa sudah menjalankan prinsip partisipasi dengan mengikutsertakan masyarakat. Untuk menetapkan APBDes, masyarakat Kecamatan Talang Kelapa selalu berpartisipasi dalam musyawarah desa. Musyawarah ini memberi tahu masyarakat tentang sumber pendapatan dan belanja desa serta program pemerintah desa apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring perkembangan desa. Dengan membantu pelaksanaan program, masyarakat dapat membantu pembangunan di desa-desa tersebut.

Teori partisipasi ini mengatakan setiap warga desa memiliki hak dalam ikut serta pada proses penetapan kesepakatan mengenai seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desanya (Sujarweni, 2015). Sebagai pelaksana, pemerintah desa diberi tugas untuk mengelola APBDes. Tujuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah agar masyarakat menjadi pemeran utama, dan mereka juga berhak untuk ikut serta dalam pengelolaannya. Untuk memastikan pemerintahan desa dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas masyarakat dalam kegiatan musyawarah, partisipasi masyarakat sangat penting. Selain itu, memeriksa bagaimana APBDes berjalan sangat penting. Masyarakat terlibat dalam proses pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat sejak awal, mulai dari pembuatan program, perencanaan dan penatausahaan, perumusan, dan pengambilan keputusan untuk memastikan rencana program desa mencapai tujuan.

APBDes sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat (Yusri, 2020). Partisipasi masyarakat (Amleni *et al.*, 2022) secara positif dan tidak signifikan memengaruhi pengelolaan dana desa. Transparansi (APBDes) dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat (Asiyah, 2022).

Namun demikian penelitian ini bertentangan (Puspitasari *et al.*, 2023) Partisipasi masyarakat tidak terdapat pengaruh terhadap pengelolaan APBDes.

Untuk variabel transparansi membuktikan transparansi pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Nilai *path coefficient* sejumlah 0,178, berarti Path Coefficient >0; t-statistik sejumlah 2.114 sehingga nilainya di atas 1,640 dan nilai p-values sejumlah 0.016 sehingga nilainya di bawah 0.100. Sesuai temuan itu mengonfirmasi hipotesis kedua bila ada pengaruh hubungan antara keterbukaan terhadap pengelolaan APBDes.

Transparansi merupakan ketika informasi tentang keuangan desa tersedia secara luas untuk masyarakat. Karena pemerintah memiliki wewenang untuk membuat ketetapan utama yang berpengaruh kepada semua kalangan manusia,

mereka harus memberikan pemberitahuan lengkap tentang apa yang dilakukan (Mahmudi, 2015).

Hasil studi ini sejalan dengan transparansi pengaruh pengelolaan dana desa (Elvina, 2023). Transparansi berdampak positif pada pengelolaan APBDes (Kusumaningrum, 2018). Studi lain memperlihatkan terdapat transparansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada pengelolaan keuangan desa (Erganda, 2020).

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat selalu terlibat dalam proses pengelolaan APBDes, hasil pengujian variabel partisipasi masyarakat menunjukkan bila ada hubungan antara keterlibatan masyarakat dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Seperti ditunjukkan oleh pengujian variabel transparansi, yang memengaruhi positif signifikan dalam mengelola APBDes. Berbagi informasi tentang pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa dan pemerintah.

SARAN

Pemerintah desa di Kecamatan Talang Kelapa diharapkan mempertahankan dan meningkatkan partisipasi, dan transparansi terhadap Pengelolaan APBDes. Dengan menerapkan prinsip responsif terhadap kebutuhan serta keinginan masyarakat dan mewujudkannya pada aktivitas pembangunan desa, dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Meningkatkan dan mempertahankan sistem yang jelas dan terbuka untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa. Peneliti berikutnya, diharapkan mampu memperluas penelitian melalui teknik wawancara untuk mendapatkan data bernilai tinggi dan menghindari kesalahpahaman saat menginterpretasikan pertanyaan. Dan diharapkan dapat menambah, mengembangkan, atau mengganti variabel lain dari prinsip *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

- Amleni, W., Mentu, H., & Lake, Y. (2022). Pengaruh Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 1(1), 30–36. <https://doi.org/10.58290/jmbo.v1i1.9>
- Asiyah, F. N. (2022). *Transparansi Anggaran Pendapatan dan Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Tlogosari*.

- Elvina, K. N. (2023). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi* (Issue April). http://digilib.uinkhas.ac.id/25352/1/BAHRULLAH_S20165021.pdf
- Erganda, I. S. (2020). *“Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa pada 13 desa di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.*
- Nur Aini Oksilia Wibawanti. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*
- Oktavia, N. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. *Skripsi.*
- Puspitasari, R. L., Astuti, D. D., & Ningsih, W. F. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Efektivitas Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. *Riemba - Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 121–134. <https://doi.org/10.31967/riemba.v1i1.941>

Buku

- Johar Arifin. (2017). SPSS untuk Penelitian dan Skripsi. In *SPSS untuk Penelitian dan Skripsi*. PT Alex Media Komputerindo, Jakarta.
- Jr, J. F. H., Matthews, L. M., Matthews, R. L., & Magdeburg, O. (2017). *PLS-SEM or CB-SEM : updated guidelines on which method to use Marko Sarstedt*. 1(2).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Rigdon, B. E. E., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2020). *On Comparing Results from CB-SEM and PLS-SEM : Five Perspectives and Five Recommendations*. 39, 4–16.
- Ringle, C. M., Wende, S., & Becker, J.-M. (2022). *SmartPLS 4*. Oststeinbek: SmartPLS GmbH. *J. Appl. Struct. Equ. Model., August.*
- Yamin, S., dan Kurniawan, H. (2011). *Generasi Baru Mengolah Data Penelitian dengan Partial Least Square Path Modeling: Aplikasi dengan Software XLSTAT, SmartPLS, dan Visual Pls.*